

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keterwakilan Perempuan di dalam politik sudah sangat lama terbelenggu dalam masa kekuasaan Orde Baru. Adanya kebijakan yang menempatkan perempuan hanya di ranah domestik. Ketika memasuki masa reformasi adanya pemberian peluang pada perempuan untuk berkandah di dalam politik. Mengakibatkan adanya peningkatan akan keterwakilan perempuan di dalam berpolitik. Adanya kebijakan afirmasi yang digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Akan tetapi, kebijakan tersebut hanya terbatas pada pemilihan legislatif dan belum menyentuh pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah yang masih netral gender. Sehingga, dalam kontestasi pilkada representasi perempuan masihlah rendah dan didominasi oleh laki-laki yang masih menjadi tantangan perempuan dalam politik.

Hal ini bisa dilihat dari kontestasi Pilkada Kabupaten/Kota 2020 di Sumatera Barat, dimana representasi perempuan yang mencalonkan diri sangatlah sedikit. Dari 45 pasangan calon bupati/walikota dan wakil bupati/walikota hanya terdapat satu pasangan yang terdapat calon perempuan. Dari satu representasi perempuan tersebut masih berhasil terpilih. Hal ini tentu berbanding terbalik jika dilihat dengan budaya yang ada di Sumatera Barat, budaya Minangkabau yang matrilineal yang egaliter terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam tulisan ini

masih terdapat banyak kekurangan mengenai pendalaman masalah karena adanya keterbatasan penulis dalam memperoleh data.

5.2 Saran

Penelitian ini membahas mengenai representasi politik perempuan terutama di dalam kasus kontestasi Pilkada 2020 di Sumatera Barat yang memiliki budaya yang unik dalam masyarakatnya yaitu budaya matrilineal. Untuk itu dengan adanya budaya tersebut tentu harusnya bisa meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam politik formal dan semoga ke depannya banyak banyak perempuan yang memiliki sumberdaya yang mumpuni untuk bisa menjadi representasi dari kelompok perempuan itu sendiri di kanvas politik.

